

Judul : Kasus Suap Satelit Monitoring, Yorrys Seret Kahar Muzakir
Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

Kasus Suap Satelit Monitoring, Yorrys Seret Kahar Muzakir

[JAKARTA] Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir. Hal ini mencuat usai Yorrys diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/5). Yorrys diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjerat koleganya, Fayakhun Andriadi.

Yorrys mengaku sempat dikonfirmasi penyidik KPK mengenai proses penganggaran proyek satelit monitoring di DPR. Namun, Yorrys mengaku tak tahu menahu mengenai proses penganggaran proyek yang diwarnai rasuah tersebut.

Menurutnya, pihak internal Golkar yang memahaminya mengenai proses mekanisme penganggaran proyek ini adalah Kahar Muzakir yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar.

"(Penganggaran) Bakamla, tadi ya ada disinggung sedikit. Saya bilang paling gampang itu kalau Anda ikuti, kalau di internal Golkar panggil Ketua Banggar. Kahar (Muzakir) kan Ketua Banggar pada saat itu," kata Yorrys usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/5).

Tak hanya Kahar, Yorrys juga menyebut nama Robert Joppy Kardinal, Bendahara Umum Partai Golkar yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurut Yorrys, Banggar, Ketua Fraksi dan Bendahara Umum merupakan pihak-pihak yang paling mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.

"Kemudian Bendahara Fraksi kan, yang kemudian menjadi bendahara umum, Saudara Robert Kardinal. Karena kalau menyangkut uang dari anggaran itu kan mengalirnya kan ke situ, Banggar, Ketua Fraksi, Bendahara Fraksi. Itu yang paling tahu persis mengenai bagaimana mekanisme-mekanisme," katanya.

Yorrys menegaskan tak tahu menahu mengenai penganggaran satelit monitoring lantaran sudah tidak bertugas sebagai anggota Komisi I DPR. Apalagi, Yorrys mengklaim, anggaran Bakamla sebelumnya dibahas di Komisi XI DPR.

"Kalau itu saya sudah tidak ada kan. Kan ada perubahan-perubahan mekanisme kan. Kalau Bakamla dulu Komisi XI kemudian ke Komisi I ya kan. Ada perubahan-perubahan sesuai MD3 yang baru dan saya sudah tidak berada di DPR," katanya.

Dalam kasus ini, Fayakhun diduga telah menerima suap terkait proses penganggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Rp 12 Miliar Fayakhun diduga menerima *fee* sebanyak Rp 12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp 1,2 triliun dari Direktur Utama PT Melati Techno Indonesia Fahmi Darmawansyah. Tak hanya *fee* dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak US\$ 300 ribu dari proyek tersebut.

Sejauh ini, KPK baru menjerat Fayakhun dari unsur DPR. Padahal, dalam persidangan kasus ini, terdapat sejumlah anggota DPR lainnya disebut turut kecipratan aliran dana dari proyek satelit monitoring. Mereka yakni politikus PDI-P Tb Hasanuddin dan Eva Sundari, serta dua politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Soal keterlibatan dan aliran dana kepada anggota DPR ini diungkapkan Direktur PT Melati Techno Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. [F-5]